



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN TIDORE ISLANDS CITY

Widia Ningsi La Madi¹ dan Pandhu Yuanjaya².

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 10-11-23

Diperbaiki 24-11-23

Disetujui 15-12-23

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Pengelolaan, Sampah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan capaian hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya untuk pengawas hanya memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, sarana dan prasarana juga terbatas, dan sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. Faktor pendukung yaitu komitmen pemerintah dan adanya kerja sama serta dukungan dari berbagai stakeholder. Sementara faktor penghambat meliputi lemahnya peran komunitas lingkungan, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, dan lemah penegakan hukum.

ABSTRACT

This study aims to explain the achievements of the implementation of waste management policies in Tidore Islands City. This research design uses a qualitative research method, a descriptive approach. The research results show that the implementation of waste management policies in Tidore Islands City is not being implemented. This is because socialization regarding waste reduction stopped in 2020. Consistency is also still minimal because there have been no firm efforts to implement administrative sanctions for business actors who do not pay fees or people who throw their waste in illegal TPS. Most of the human resources implementing this policy, especially for supervisors, only have junior high and high school equivalent levels of education, while at DLH there is a lack of experience and employees with an educational background in the field of environmental engineering. Limited budgets make it difficult to procure machines for waste recycling, facilities and infrastructure are also limited, and attitude of implementers has shown commitment and honesty. There is an SOP to waste management and fragmentation involving DLH, the district and the community in the district. Supported factors are government commitment and cooperation and support from various stakeholders. Meanwhile, inhibiting factors include the weak role of the environmental community, public behavior and awareness in sorting waste, and weak law enforcement.

Keywords:

Policy Implementation,
Waste Management

1. Pendahuluan

Negara-negara di seluruh dunia tentu memiliki permasalahan yang beragam di negaranya masing-masing, mulai dari masalah ekonomi, kependudukan, sosial, dan budaya, maupun lingkungan. Di Indonesia, masalah lingkungan menjadi salah satu permasalahan pokok yang masih belum banyak terselesaikan. Masalah lingkungan hari ini, bukan lagi permasalahan yang semata-mata bersifat alami dan organik. Manusia justru menjadi faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa kerusakan lingkungan (Herlina, 2015). Khususnya, masalah lingkungan yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia mulai dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta masalah sampah (Yulistia dkk, 2015). Salah satu masalah lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia yaitu berkaitan dengan sampah. Sampah merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia (Hardiatmi, 2011). Berdasarkan data yang dikeluarkan *Indonesia National Plastic Partnership* (2020), sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Bahkan, 9% atau sekitar 620 ribu ton masuk ke laut, danau, dan sungai. Menurut data lembaga tersebut, sampah yang dihasilkan Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000ton sampah setiap harinya, diperkirakan kenaikan jumlah sampah pada tahun 2025, yakni mencapai 150.000ton. Jumlah ini rata-rata berasal dari data sampah rumah tangga, yaitu berkisar 60-75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Indonesia masih belum pernah terlihat keberhasilannya (Pranita, 2021).

Salah satu wilayah yang memiliki kondisi memprihatinkan akibat permasalahan pengelolaan sampah adalah Kota Tidore Kepulauan. Tidore Kepulauan kini tergolong sebagai kota besar dengan begitu banyak masyarakatnya yang beragam dan padat. Saat ini, jumlah kepadatan penduduk Kota Tidore Kepulauan sebanyak 116,149 jiwa dengan luas wilayah 1.550,37 km² (Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, 2021). Seperti pada daerah lainnya, Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di wilayah Maluku Utara. Dengan menghasilkan timbunan sampah sebanyak 45 ton setiap harinya. Jumlah tumpukan sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk setempat per harinya. Semakin banyak penduduk yang menempati suatu wilayah semakin banyak juga jumlah sampah yang dihasilkan. Sedangkan, timbunan sampah terbesar pada Kota Tidore Kepulauan berada di Kecamatan Oba Utara ini karena tidak diangkut ke TPA, penyebabnya karena jalan masuk menuju lokasi TPA yang dibangun oleh Balai Sarana Prasarana Maluku Utara di Tabadamai itu sulit untuk dilewati (Siregar, 2019).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seluruh sampah yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan belum dikelola dengan baik, terutama pada kawasan-kawasan pemukiman di daratan Kecamatan Oba seperti Kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan.

Tabel 1. Target dan Capaian Sampah Tahun 2019-2020

No	Keterangan	Target (dalam ton)				Capaian (dalam ton)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I	Jumlah Timbunan Sampah	16.476	16.685	16.897	17.111	16.568,81	16.753,21	16,834,53	16,904,46
II	Jumlah Pengurangan Sampah	2,928	3,295	3,671	4,055	2,446,12	1,707,48	1,770,24	1,596,55
III	Jumlah Penanganan Sampah	11,876	13,180	12,514	12,504	9,165,36	9,055,65	9,070,80	11,052,20
IV	Sampah yang dikelola					11,611,48	10,763,13	10,841,04	12,684,75
V	Sampah Tidak dikelola					4,957,33	5,990,08	5,993,49	4,255,71

Sumber: DLH Kota Tikep, (2022)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa timbunan sampah yang ada di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah sampah-sampah tersebut dipengaruhi oleh perilaku konsumsi yang berasal dari sumber dan peningkatan jumlah penduduk di Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan dari tahun 2021 hingga 2023 timbunan sampah setiap tahun masih tetap meningkat dengan 16,904,46 ton/tahun dari 115.784 jiwa. Sedangkan setiap harinya timbunan sampah yang dihasilkan dengan jumlah 46.31 ton/hari. Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan di sebabkan oleh komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah secara *continue* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta UPTD Kecamatan Oba Utara. Semua kendala atau hambatan dalam proses implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari masalah sumber daya, masih kurangnya sumber daya kepegawaian pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup sehingga menghambat proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Kemudian sarana dan prasarana dalam pengangkutan sampah di Kota Tidore Kepulauan belum memadai, banyaknya volume sampah yang menumpuk di Kota Tidore Kepulauan menyebabkan masih kurangnya truk pengangkut sampah di Kota Tidore Kepulauan dan belum adanya sarana yang menunjang pengelolaan sampah di daratan oba. Masalah lain juga ada pada disposisi masih banyak para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah seperti masyarakat di Kota Tidore Kepulauan belum memahami secara maksimal dalam pengelolaan sampah. Selain itu, masalah lain ada pada birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu kurang kerjasama dan koordinasi dengan organisasi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, camat, kepala desa dan pihak uptd Oba Utara dalam mengatasi penumpukan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Tidore Kepulauan mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Terkait dengan hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian maka diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu melaksanakan

kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup mengatur bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah.

Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu Kota yang ada di Maluku Utara yang mengalami permasalahan sampah sehingga Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sendiri telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah dalam menangani kasus permasalahan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 ayat (6) yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga, pada pasal 1 ayat (7) sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, pasal 1 ayat (17) Penghasil Sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah, sedangkan dalam pasal 1 ayat (18) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan/tetap, sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang.

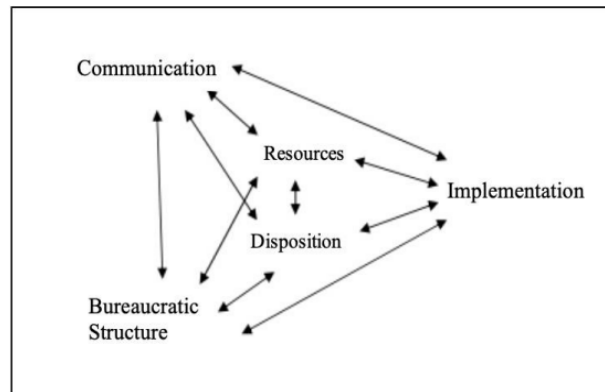
Adapun upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan saat ini untuk melakukan pembangunan bank sampah dengan cara memilih sampah dan menjadikan TPS 3R yaitu (*recycle, reduce, dan reuse*) sehingga akan meminimalisir penumpukan sampah di TPA. Berdasarkan hasil wawancara pada observasi penelitian kepada pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, hanya memiliki 18 TPS Bak Kontainer itupun hanya di 9 lokasi warga sering kali memilih untuk membuang sampah di sembarang tempat dan banyaknya muncul TPS liar sehingga tercemarnya lingkungan udara dan air di TPS liar tersebut. Selain itu adanya indikasi belum terlaksananya SOP yang baik tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Hal

ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, Bapak Idwan kepada penulis saat wawancara pra penelitian pada 15 Juni 2023. Beliau mengatakan bahwa terdapat hambatan dalam SOP pengelolaan sampah, salah satunya pada sumber daya implementor, beberapa diantaranya ialah staf masih kurang disiplin dalam pengangkutan sampah dan kurangnya komitmen dalam bekerja, belum adanya program pengurangan sampah serta belum terlaksananya Perda yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah.

Di dalam administrasi publik, sampah menjadi suatu permasalahan penting yang berkaitan dengan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sampah pemerintah mengambil kebijakan tentang pengelolaan sampah. Salah satu proses pada kebijakan publik adalah implementasi. Adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah tingkat pusat maupun tingkat daerah termasuk pedesaan, maka aturan tersebut perlu diimplementasikan agar permasalahan sampah dapat teratasi. Di dalam implementasi kebijakan tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan cenderung hanya dilihat dari sudut pandang beberapa *stakeholder* saja seperti Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat serta masih belum berfokus pada program implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan sesuai urgensi masalah yang ada. Masalah yang dihadapi saat ini ialah Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Tidore Kepulauan dipengaruhi oleh komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang belum maksimal, minimnya infrastruktur, pelayanan sampah Kota Tidore Kepulauan belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan komunikasi dengan kelompok sasaran yang kurang. Selain itu, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana serta partisipasi dan keikutsertaan sosialisasi dari masyarakat masih sangat kurang.

Sementara implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan dari pemerintah dalam mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat. Adanya kebijakan tersebut akan melahirkan keputusan-keputusan yang solutif dalam memecahkan sebuah masalah. Dalam hal ini, kebijakan dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang dapat diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui berbagai tahapan yang ada (Awang, 2010). Selain itu, penelitian yang mengangkat topik mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum ada, sehingga penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu penelitian yang perlu dilakukan karena penelitian ini akan melihat dari dimensi struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi dalam kinerja implementasi kebijakan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji secara kualitatif dengan menggunakan teori Edward III 1980 dalam Mubarak dkk, (2020) sebagai indikator dalam capaian hasil implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam menerapkan implementasi kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap sosial dan lingkungannya dapat dilakukan

dengan melihat tiga indikator dari Model Edward 1980 dalam Mubarok, dkk (2020) yaitu:



Gambar 1. Model Kebijakan Edward 1980 (Mubarok dkk, 2020)

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ada tiga unsur dalam komunikasi yaitu pertama transisi (sosialisasi), agar kebijakan publik disampaikan tidak hanyadisampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi jugadisampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, kejelasan, agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dan ketiga Konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Perintah dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implemementasi berjalan efektif. Ada tiga unsur dalam sumber daya yaitu pertama Sumber daya manusia, sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Kedua sumber daya anggaran, karena terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dan ketiga, sarana dan prasarana, adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting lain dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana atau disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Adapun dalam hal ini meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi adanya standar operasional prosedur (SOP), dan fragmentasi.

Keempat pilar tersebut saling mendukung demi tercapainya keberlanjutan atau *sustainability*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan capaian hasil implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya administrasi publik pada kajian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi permasalahan sosial yang diangkat, baik individu maupun kelompok (Creswell, 2019). Selain itu, jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata/bahasa pada konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2006). Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif karena peneliti hendak menjelaskan capaian hasil terkait implementasi kebijakan dari setiap pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Dalam memperoleh data dan informasi yang memiliki pemaknaan mendalam terhadap kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara daripada kuesioner. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara itu, peneliti memilih desain penelitian secara deskriptif agar dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dari berbagai sudut pandang mengenai pemaknaan setiap informan dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Melalui penelitian yang sifatnya deskriptif mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan capaian hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan.

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahapan, meliputi pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, analisis data dan pemaknaan data (Creswell, 2016). Tahap pertama, yaitu peneliti perlu menyusun pertanyaan atau pedoman wawancara dan menyusun pernyataan atau pedoman observasi terlebih dahulu. Penyusunan pedoman wawancara dan observasi didasarkan pada teori Mubarak dkk, (2020) tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah menyoroti empat indikator dalam membahas suatu kebijakan yaitu isi, konteks, proses, dan aktor. Tahap kedua adalah pengumpulan data dimana dapat dilakukan setelah pedoman wawancara dan observasi dinyatakan keabsahannya oleh dosen pembimbing. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) teknik pengumpulan, antara lain wawancara dan observasi langsung beserta dokumentasi. Dengan tiga teknik tersebut dapat melengkapi temuan-temuan penelitian. Tahap ketiga adalah analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian dari berbagai sumber data dan informan penelitian. Dimana pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020) yang terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian sekaligus menjadi tahapan terakhir dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Masalah implementasi kebijakann pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan saat ini bukan menjadi hal yang tabu. Kota yang dulunya merupakan hamparan pepohonan yang hijau kini sudah berubah menjadi kotor karena sampah-sampah yang berhamburan di setiap sudut Kota Tidore Kepulauan. Berikut penejlasan lebih lanjut mengenai masalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian yang di dapatkan dari wawancara dan dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, Petugas *Sogoroho Gam*, Komunitas Lingkungan dan Masyarakat. Keempat narasumber tersebut menjadi pelaksana teknis dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Perolehan data penelitian yang akan dijabarkan

sesuai dengan fokus penelitian pada pembahasan ini. Fokus penelitian tersebut berdasarkan teori model implementasi kebijakan Edward III dalam Mubarak dkk, (2020), yang terdiri dari empat fokus dalam variabel suksesnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Peneliti menjelaskan capaian hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan dipaparkan pada penelitian ini dimulai dari struktur birokrasi terlebih dahulu dikarenakan pada program implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini sudah memiliki badan hukum, struktur yang menyelesaikan masalah yang mana ada orang-orangnya dan juga ada fungsi serta tugas. Kemudian ada sumber daya yaitu manusianya seperti apa, anggaran, sarana prasarana yang digunakan. Jika sudah ada struktur birokrasi dan sumber daya kemudian program ini melakukan komunikasi satu sama lain antara organisasi internal dan eksternal pemerintah daerah maupun luar daerah. Dan yang terakhir disposisi yang berbicara terkait bagaimana kemauan masing-masing struktur birokrasi tadi atau orang-orang yang mau terlibat dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan dan juga membahas terkait komitmen untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah karena sudah menjadi tanggung jawab.

1. Struktur Birokrasi

Menurut Winarno (2016) struktur birokrasi merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Dengan dikeluarkannya Perda nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan untuk memformulasikan program-program dan perlakuan teknis dalam pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan. Dalam pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi Maluku Utara, UPTD yang ada di wilayah kecamatan Oba Utara, dengan dukungan dari Komunitas Plastik *Ranger* dan lainnya. Kedudukan masing-masing Pemerintah berada di tingkat Technical Team, Preparation & Implementation dan kedudukan UPTD Bersama Komunitas Plastik *Ranger* berada di tingkat *operation*.



Gambar 2. Gerakan Bersih Pantai Taman Rum sekaligus Pilah Sampah dan Timbang Sampah

Dalam hal ini UPTD bersama Komunitas Lingkungan menjadi wadah atau tempat bagi Pemerintah Kota untuk saling berkoordinasi untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Setiap pegawai di unit pengelolaan sampah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Dengan demikian, dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan didukung struktur birokrasi atau organisasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pegawai dan unit kerja. Tanpa adanya koordinasi, kebijakan pengelolaan sampah tidak akan efektif. Oleh karena itu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Dan juga pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan, Komunitas Lingkungan, Petugas *Sogoroho Gam*, UPTD Kecamatan Oba Utara, dan Masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan.

2. Sumber Daya

Menurut George Edward III 1980 dalam Mubarok dkk (2020), menegaskan apabila ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada dalam suatu kebijakan sudah jelas, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, sumber daya yang mencukupi sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya manusia pelaksana kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan secara jumlah belum mencukupi. Sebab satu beban masalah hanya di ampu oleh satu instansi yang berkontribusi dalam penyediaan SDM. Sedangkan menurut Winarno (2016) sumber daya dalam implementasi merupakan hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas dan terus konsisten hal ini diharapkan agar para pelaksana implemementasi berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan sumber seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran (SDA), dan sarana maupun prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, karena manusia merupakan pelaksana penting yang akan menentukan pencapaian kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam rangka mencapai tujuannya didukung oleh 30 orang pegawai yang berstatus ASN dan 12 pegawai non ASN. Dari jumlah tersebut terdapat 9 orang berpendidikan Strata 2 (S2), 23 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 2 orang berpendidikan Diploma (D4), dan 4 orang berpendidikan SMA.

Adapun di Kota Tidore Kepulauan juga terdapat Petugas *Sogoroho Gam* yang mana merupakan petugas yang disediakan langsung oleh DLH Kota Tidore Kepulauan untuk mempermudah dalam pengelolaan sampah:

Tabel 2. Tenaga Kebersihan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan

Tenaga Kebersihan (Laskar Sogoroho Gam)	Jumlah/Kapasitas
Supir	10 orang
Petugas Angkut	34 orang
Petugas Sapu	77 orang
Operator Alat berat	3 orang
Satgas	9 orang
Petugas Paras	13 orang
Petugas TPA	5 orang

b. Sumber Daya Anggaran

Mengenai sumber daya anggaran, dana yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dalam pengelolaan sampah bersumber pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan dan dana DAK APBN.

c. Sumber daya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana, adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Adapun data sarana dan prasarana DLH Kota Tidore Kepulauan yaitu kaizer 25 unit, mobil dumptruck 6 unit, mobil amroll 4 unit, becoloder 1 unit, bulldozer 1 unit, exsavorator 1 unit, dan kontainer aktif 18 buah.

3. Komunikasi

Sebagaimana yang dijelaskan oleh George C. Edward III dalam Mubarok et. al, (2020) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, maka setiap implementor kebijakan harus menguasai tanggung jawab dan kewenangannya dalam pelaksanaan kebijakan. Berbeda dengan pendapat Winarno (2016) bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu diperlukan sosialisasi, kejelasan serta konsistensi yang baik atas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan yang diimplementasikan kepada seluruh pihak yang terkait.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan, komunikasi antara implementor kebijakan dilakukan dengan cara melakukan pertemuan atau rapat yang rutin diadakan untuk saling berkoordinasi agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan sistematis dan mampu mencapai tujuan kebijakan tersebut. Selain rapat intern instansi, penyampaian informasi juga dilakukan dengan rapat atau pertemuan dengan instansi lain yang terkait. Koordinasi tersebut dilakukan dengan bantuan UPTD Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Oba Utara bersama Komunitas Plastik *Ranger* Kota Tidore Kepulauan menjadi instansi perantara. UPTD DLH bersama Komunitas Plastik *Ranger* dalam hal ini menjadi tempat atau wadah terjadinya koordinasi antara instansi pengelolaan sampah yang ada di pulau tidore dan daratan oba. Sedangkan untuk komunikasi antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan khususnya Bidang Pengelolaan Sampah sebagai implementor kebijakan juga menjalin komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi.



Gambar 3. Sosialisasi PAS KOPI DABE

Dengan adanya komunikasi yang terjalin baik antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan, maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh George C. Edward III dalam Mubarok, dkk (2020) yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik bila terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan telah melakukan komunikasi yang

efektif dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan untuk turut serta berperan aktif dalam implementasi pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan telah melakukan sosialisasi berulang dan bertahap kepada para kelompok sasaran kebijakan yang akan dibangun Bank Sampah, sehingga masyarakat menjadi paham akan manfaat adanya Bank Sampah dan mendukung kebijakan tersebut. Dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang muncul untuk membantu pengelolaan sampah di wilayah masing-masing RT/RW. Dengan adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), implementor kebijakan menjadi lebih mudah untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Komunikasi positif yang terjalin antara implementor kebijakan dengan sasaran kebijakan akan membantu dan mempermudah tercapainya tujuan kebijakan yang dicita-citakan.



Gambar 4. Kegiatan Bacarita Lingkungan

Dengan demikian komunikasi menjadi sangat penting sehingga esensi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang mewujudkan kebersihan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Disposisi

George C. Edward III dalam Mubarok et. al, (2020) mengemukakan bahwa disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Bahwa pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan telah menunjukkan sikap disposisi yang positif. Para pelaksana kebijakan mendukung adanya kebijakan pengelolaan sampah sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan serius. Menurut Prayitno (2010) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan komitmen dalam hal ini bermaksud keseriusan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Komitmen para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah dapat dilihat dari keberlangsungan kebijakan ini di Kota Tidore Kepulauan. Yang semula pengelolaan sampah hanya terfokus pada penanganan sampah dan pengurangan sampah, saat ini telah berkembang dengan adanya pengelolaan sampah secara wilayah atau komunal yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan menjaga komitmen antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan dengan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat

dilihat dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga dengan baik sehingga kebijakan ini dapat tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan secara empiris didukung oleh empat faktor utama yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Keempat faktor tersebut masih belum terlaksana dengan baik dalam implementasinya sehingga tujuan yang diharapkan kurang efektif selama dua tahun implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu untuk mewujudkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan para pelaksana harus bekerja keras. Kombinasi keempat faktor tersebut belum efektif diterapkan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Kota Tidore Kepulauan. Sesuai dengan penjelasan dari Kartikawan (2007) bahwa pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan daerah itu sendiri, yaitu pengaruh positif jika dilakukan dengan baik dan pengaruh negatif jika tidak dilakukan pengelolaan sampah.

Kemudian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan tentutidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik dari faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

- a. Komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
- b. Adanya kerja sama dan dukungan antara seluruh stakeholder lembaga pemerintah, komunitas, serta masyarakat

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan yaitu adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Minimnya sarana prasana pengelolaan sampah
- 2) Lemahnya peran Komunitas Lingkungan
- 3) Kelembagaan Bank Sampah belum optimal
- 4) Minimnya perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Tidore Kepulauan masih kurang terlaksana. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi, sosialisasi atas pengurangan sampah berhenti di tahun 2020. Konsistensi juga masih minim karena belum adanya upaya ketegasan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak membayar retribusi maupun masyarakat yang membuang sampahnya di TPS liar. Dari segi sumber daya, sebagian besar SDM pelaksana kebijakan ini khususnya

untuk pengawas hanya memiliki tingkat Pendidikan SLTP dan SLTA sederajat sementara untuk di DLH sendiri minimnya pengalaman serta pegawai yang berlatar belakang pendidikan dari bidang teknik lingkungan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pengadaan mesin untuk daur ulang sampah sulit direalisasikan, mengingat harga untuk per unitnya yang relatif mahal dan belum memungkinkan untuk diberikan kepada seluruh Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak, TPS di beberapa kelurahan volume daya tampung sampahnya juga terbatas. Dari segi disposisi, sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi, adanya SOP terkait pengelolaan sampah dan fragmentasi yang melibatkan DLH, Kecamatan hingga masyarakat di kelurahan. Dari segi faktor pendukung yaitu adanya komitmen pemerintah dan adanya kerja sama serta dukungan dari berbagai stakeholder. Faktor penghambat meliputi lemahnya peran komunitas lingkungan, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, dan lemahnya penegakan hukum.

Referensi

- [1] Anna S. Wahongan, K. C. P. (2022). Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Law Review*, 1, 48–57.
- [2] Azwar, A. (2010). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya.
- [3] Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] DLH Kota Tikep (2023). Strategi Optimalisasi Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Daerah Secara Berkelanjutan (PAS-Kopi Dabe) Pada Kota Tidore Kepulauan. *Laporan Proyek Perubahan 2023*, 1-119.
- [6] DLH Kota Tikep (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan 2022*, 1-91.
- [7] DLH Kota Tikep (2021). Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan 2021-2023. 1-51.
- [8] Herlina, Nina. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Galuh Justisi*. 3(1).
- [9] Kartikawan, Y. (2007). *Pengelolaan Persampahan*. J. Lingkungan Hidup.
- [10] Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- [11] Mubarak, S., Zauhar, S., & Setyowati, E., et.al (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration
- [12] George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*. 5 (1). 33-38.
- [13] Pranita, E. (2021). Masalah Sampah Indonesia Target Nol Emisi, Kok Bisa? Kompas.com.
- [14] Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152.

- [15] Siregar, L. P. (2019). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palembang (studi di Kecamatan Sukarami)*.
- [16] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet Ghazali.
- [17] Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pessindo.